

# Strategi Amnesty Internatioal dalam Advokasi Hak Asasi Manusia pada Kasus Extrajudicial Killings di Venezuela Tahun 2017 - 2021

*by* 07041182025002 Salsabilla Putri Heryana Amin

---

**Submission date:** 22-Nov-2024 08:06AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2507378468

**File name:** Venezuela\_Tahun\_2017\_-\_2021\_-\_Salsabilla\_Putri\_Heryana\_Amin.docx (289.8K)

**Word count:** 9679

**Character count:** 67592

**STRATEGI *AMNESTY INTERNATIONAL* DALAM ADVOKASI HAK  
ASASI MANUSIA PADA KASUS *EXTRAJUDICIAL KILLINGS* DI  
VENEZUELA TAHUN 2017 – 2021**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(S1) dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**Salsabilla Putri Heryana Amin**

**07041182025002**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Venezuela, negara yang dilimpahi kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak bumi, kini tengah dilanda krisis multidimensi yang kompleks dan berkepanjangan. Krisis ini tidak hanya melumpuhkan aspek-aspek kehidupan internal negara, tetapi juga memicu gejolak dan dinamika yang signifikan dalam lanskap hubungan internasional. Pada abad ke-20, Venezuela mengalami transformasi dari masyarakat agraris yang relatif miskin menjadi masyarakat perkotaan yang berkembang pesat. Mulai dari tahun 1958 hingga awal abad ke-21, Venezuela relatif lebih demokratis dan politiknya lebih stabil dibandingkan dengan sebagian besar negara Amerika Latin lainnya. Ekonominya juga diuntungkan oleh industri minyak bumi yang berkembang pesat, memanfaatkan cadangan minyak terbesar di dunia yang diketahui (Lieuwen, Heckel, & Martz, 2024).

Di awal abad 20 negara ini dikuasai oleh pemimpin militer yang mendorong perkembangan industri minyak memberikan ruang bagi beberapa reformasi sosial. Venezuela adalah salah satu negara di Amerika Latin yang memiliki sejarah pemerintahan yang sangat kompleks, meliputi percobaan kudeta, pemerintahan otoriter, serta tantangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Walaupun pemerintahan yang terpilih secara demokratis telah memegang kendali sebagian besar sejak tahun 1959, kekuasaan eksekutif di bawah kepemimpinan Hugo Chávez, yang menjabat sebagai presiden dari tahun 1999 hingga 2013, semakin memperkuat kendali otoriter atas cabang pemerintahan lainnya (CIA, 2024).

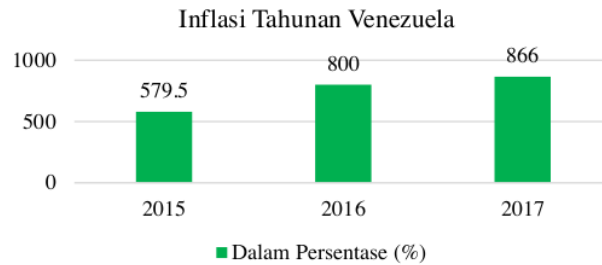
Ekonomi dan politik yang tidak stabil terus berlangsung hingga Hugo Chavez terpilih sebagai presiden pada tahun 1999. Chavez dianggap sebagai tokoh populis karena

berhasil meningkatkan kondisi ekonomi Venezuela. Melalui pendekatan ekonomi sosialis modern, Chavez menciptakan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi negaranya. Pada permulaan masa kepresidenannya, ia merumuskan konstitusi baru untuk negara tersebut, yang termasuk mengubah namanya menjadi Republik Bolivarian Venezuela. Selanjutnya, upayanya terpusat pada pengambilalihan kendali atas perusahaan minyak negara, yang menjadi sumber kontroversi dan memicu protes (Razali, 2014).

Nicolas Maduro Moros telah menggantikan Hugo Chavez sebagai presiden Venezuela pada tahun 2013, dimana sebelumnya Maduro merupakan wakil presiden Chavez saat pemilu 2012. Tidak lama setelah Maduro naik menjadi presiden, harga minyak global mengalami penurunan drastis dan Venezuela adalah salah satu negara yang bergantung hampir sepenuhnya pada pendapatan minyak, tergelincir dalam resesi. Inflasi di negara ini akhirnya meningkat pesat dan barang-barang pokok mengalami kelangkaan (BBC, n.d). Harga minyak global yang mengalami penurunan telah memberikan dampak bagi negara kehilangan 60% dari pendapatannya, sehingga pada tahun 2016 Pemerintah Venezuela mendeklarasikan keadaan darurat ekonomi selama 60 hari pada tahun 2016 sebagai langkah untuk menangani krisis yang kian memburuk (Nursalikhah, 2016). Krisis ekonomi Venezuela mengalami defisit pendapatan yang menyebabkan kerugian besar dan menjerumuskan ekonominya ke dalam krisis ekonomi yang panjang, yang diperburuk dengan tingginya inflasi mata uang negara ini yaitu bolivar yang telah diperkirakan oleh *International Monetary Fund* (IMF) bahwa inflasi di Venezuela dapat mencapai 1.000.000% di akhir tahun 2018 bahkan dapat terus meningkat (Budisatria, Hamoraon, & Dwiputra, 2022). Otoritas moneter Venezuela

menunjukkan tingkat transparansi data ekonomi yang rendah dengan minimnya publikasi data statistik ekonomi oleh Bank Sentral Venezuela.

**Tabel 1.1 Inflasi Tahunan Venezuela 2015 - 2017**



Sumber: (Reuters, 2024)

Dipicu oleh krisis ekonomi yang parah, kelangkaan makanan dan obat-obatan, serta meningkatnya ketegangan politik, akhirnya aksi demonstrasi oleh masyarakat yang ditujukan kepada pemerintahan Nicolas Maduro terjadi pada tahun 2017. Aksi demonstrasi yang terjadi ini direspon oleh pemerintah Venezuela dengan tindakan represif dengan mengerahkan kekuatan militernya. Tindakan represif yang dilakukan mencakup pemukulan, penembakan, dan penggunaan gas air mata secara terus menerus yang mengakibatkan puluhan warga tewas dan banyaknya mahasiswa yang ditahan. Tidak hanya itu, kebebasan pers hingga penindasan kepada pihak yang dianggap bertentangan dengan pemerintah pun telah dibatasi, tentunya tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) (Kunkunrat, Priangani, & Monica, 2021). Keadaan hak asasi manusia di Venezuela terus mengalami tantangan dengan kekurangan dalam mencapai hak-hak ekonomi dan sosial yang penting. Rezim Presiden Nicolas Maduro terjerat tuduhan melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis, termasuk *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh

pasukan keamanan, terutama unit polisi khusus seperti *Fuerzas de Acciones Especiales* (FAES).

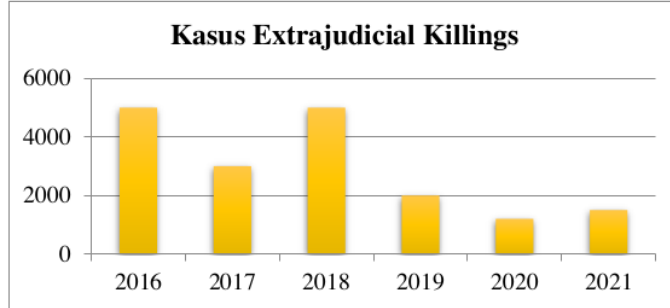
*Extrajudicial killing* merujuk pada tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah tanpa melalui proses peradilan atau prosedur hukum yang sah. Tindakan ini terjadi karena otoritas tertentu diberikan diskresi untuk mengambil langkah-langkah tertentu di lapangan yang biasanya disebabkan oleh situasi khusus. Sehingga dapat dikatakan unsur yang membentuk *extrajudicial killing* melibatkan dua hal yaitu, dilakukan di luar kewenangan peradilan dan dilaksanakan tanpa melalui proses hukum yang. Selain itu, tindakan ini dilakukan oleh aparat negara, serta tidak dalam konteks pembelaan diri atau berdasarkan perintah undang-undang (Astawa & Munasto, 2022). Tindakan *extrajudicial killings* merampas berbagai hak asasi manusia mendasar yang telah dilindungi oleh hukum internasional seperti hilangnya hak atas kehidupan, hak atas perlindungan hukum, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hingga hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Karakteristik kasus *extrajudicial killing* di Venezuela menunjukkan bahwa korban sering kali adalah demonstran, aktivis politik, atau warga sipil yang dianggap sebagai oposisi pemerintah. Selain itu, kelompok masyarakat miskin dan marginal yang dituduh melakukan kegiatan kriminal juga menjadi target. Aparat kepolisian dan militer sering kali menjadi pelaku utama dalam operasi-operasi ini, dimana mereka melakukan penangkapan tanpa prosedur hukum, eksekusi di tempat, dan tidak memberikan akses kepada korban untuk memperoleh peradilan yang adil. Pemerintah Nicolas Maduro menggunakan operasi ini sebagai sarana untuk menekan oposisi dan meredam kritik terhadap kekuasaannya. Sejak tahun 2016, aparat kepolisian dan pasukan keamanan di Venezuela diduga telah menewaskan hampir 18.000 orang dalam insiden yang

diklasifikasikan sebagai ‘perlawanan terhadap otoritas’. Klaim bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam rangka ‘memerangi kejahatan’ sering digunakan sebagai justifikasi untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi (hrw.org, 2019).

*Amnesty International*, sebagai organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, telah berperan aktif dalam memantau dan melaporkan kekerasan sistemik di Venezuela. Keterlibatan *Amnesty International* dalam pemantauan hak asasi manusia di Venezuela telah berlangsung cukup lama. Pada tahun 2002, *Amnesty International* mulai menonjol dalam menangani kasus kerusuhan yang terjadi sehubungan dengan kudeta singkat terhadap Presiden Hugo Chaves. Keterlibatan organisasi ini semakin intens setelah tahun 2014, seiring dengan memburuknya krisis politik dan ekonomi di Venezuela. Tugas *Amnesty International* mencakup penelitian, advokasi, serta penyelenggaraan kampanye untuk mencegah, melindungi, dan menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Melalui penyelidikan yang komprehensif, *Amnesty International* bertujuan untuk mengekspos praktik *extrajudicial killings* yang dilakukan oleh pihak keamanan negara, serta mendesak pertanggungjawaban pemerintah dalam memastikan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga sipil.

**Tabel 1. 2 Kasus *Extrajudicial Killings* di Venezuela Periode 2016 – 2021**



Sumber: (*Annual Reports dan Human Rights Updates Amnesty International*)

*Amnesty International* secara konsisten mengeluarkan laporan mengenai kasus pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan di Venezuela. Menurut data yang dikutip dari *Amnesty International*, tercatat adanya ribuan kematian dimana warga sipil, terutama demonstran dan aktivis oposisi, menjadi korban tindakan brutal dengan FAES dan unit keamanan lainnya sebagai pelaku utama. Laporan-laporan *Amnesty International* telah memainkan peran penting dalam mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis di Venezuela dan mendorong komunitas internasional untuk mengambil tindakan. Tidak hanya mengumpulkan dan mendokumentasikan tindak pelanggaran, *Amnesty International* juga melakukan advokasi di tingkat internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang situasi HAM di Venezuela, dengan mengadakan pertemuan dengan pejabat pemerintah, berpartisipasi dalam forum-forum internasional, dan meluncurkan kampanye *online* maupun *offline* untuk menyoroti isu-isu HAM di negara tersebut.

Selanjutnya, organisasi ini memberikan dukungan kepada para korban pelanggaran HAM di Venezuela melalui program-program bantuan hukum, pemantauan kondisi tahanan, serta kampanye untuk memperjuangkan pembebasan tahanan politik. Selain itu, *Amnesty International* juga aktif dalam memobilisasi masyarakat sipil di Venezuela dan di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam upaya memperjuangkan hak asasi



manusia, melalui berbagai kegiatan seperti kampanye online, petisi, aksi solidaritas, dan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk mendukung perubahan positif di Venezuela (amnesty.org, Human Rights in Venezuela Amnesty International, n.d).

Pecahnya aksi demonstrasi yang menyuarakan tuntutan akan perubahan rezim di tahun 2017 menjadi titik tertinggi dari krisis multidimensi yang melanda Venezuela, menandai kenaikan signifikan dalam pelanggaran HAM terutama kasus extrajudicial killings. Unjuk rasa massal yang meletus dibalas dengan kekerasan oleh aparat keamanan, ditambah dengan penangkapan massal dan pembatasan kebebasan berpendapat, menciptakan situasi darurat kemanusiaan yang mengundang perhatian internasional. Sebagai organisasi yang berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia, *Amnesty International* memiliki peran penting dalam mengadvokasi keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus *extrajudicial killing* di Venezuela. Melalui laporan, kampanye internasional, dan tekanan kepada pemerintah, organisasi ini berupaya menghentikan impunitas dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih menghormati hak-hak fundamental. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana upaya advokasi yang dilakukan oleh *Amnesty International* pada periode 2017 – 2021 di tengah krisis politik dan keamanan yang sedang terjadi di negara tersebut.

## <sup>1</sup> 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Advokasi yang Diterapkan oleh *Amnesty International* untuk Menekan Pemerintah Venezuela dalam Kasus *Extrajudicial Killings*?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dengan judul “Upaya Amnesty International Dalam Advokasi Hak Asasi Manusia Pada Kasus Extrajudicial Killings Di Venezuela Tahun 2017 – 2021” adalah untuk mengidentifikasi strategi advokasi yang digunakan *Amnesty International* dalam upaya menekan pemerintah Venezuela terkait kasus *extrajudicial killing* pada periode 2017 – 2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran baru dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan bagaimana respon global terhadap isu tersebut.

#### **1.4.2 Manfaat Praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi baik untuk mahasiswa, peneliti Hubungan Internasional, hingga masyarakat umum dalam membantu memahami <sup>1</sup> isu hak asasi manusia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada beberapa referensi penelitian sebelumnya yang menjadi dasar bagi penelitian yang dilakukan. Referensi penelitian sebelumnya ini digunakan untuk mendalami pemahaman tentang permasalahan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti. Dengan menggali penelitian terdahulu, peneliti dapat menempatkan dan membandingkan hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan temuan dan teori yang telah ada sebelumnya, serta mengidentifikasi aktor-aktor penelitian yang terlibat dalam konteks yang sama.

**Tabel 2. 1 Peneltian Terdahulu**

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Peneliti	Nuryanti, Salsabila
	Judul Penelitian	Strategi Kebijakan Pemerintah Venezuela di Tengah Krisis
	Sumber Penelitian	Sospol; Jurnal Sosial Politik Vol. 5 No.2 (2019), Hlm 237-248
	Tahun Penelitian	2019
	Hasil Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemerintah Venezuela dalam mengatasi krisis yang melanda negara tersebut, terutama dalam konteks krisis ekonomi yang memunculkan berbagai dampak sosial dan politik yang merugikan. Penelitian ini juga mencatat

		<p>beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi, antara lain kebijakan diverifikasi ekonomi, diplomasi bantuan luar negeri, stabilisasi harga pangan, penguatan pelayanan kesehatan masyarakat, dan penguatan kerja sama regional dengan organisasi di kawasan Amerika Latin. Dalam penelitian ini juga menyoroti pentingnya saling ketergantungan antara negara-negara dalam sebuah organisasi regional, yang dalam pembahasan seperti organisasi Mercosur, dimana krisis yang terjadi di satu negara anggota dapat berdampak pada negara anggota lainnya.</p>
	Perbandingan Penelitian	<p>Persamaan:</p> <p>Persamaan penelitian yang dilakukan menunjukkan fokus yang sama pada eksplorasi strategi dan tindakan yang diambil oleh para aktor dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi di Venezuela.</p> <p>Perbandingan:</p> <p>Penelitian yang dikemukakan oleh Nuryanti dan Salsabila memfokuskan bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi yang sedang melanda, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus pada upaya <i>Amnesty International</i> untuk mengadvokasikan hak asasi manusia yang terabaikan akibat terjadinya krisis yang terjadi di Venezuela.</p>

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
2.	Nama Peneliti	Lee J.F. Deppermann

Judul Penelitian	<i>Increasing the ICJ's Influence as a Court of Human Rights: The Muslim Rohingya as a Case Study</i>
Sumber Penelitian	<i>Chicago Journal of International Law</i> Vol. 14 No. 1 Article 9
Tahun Penelitian	2013
Hasil Penelitian	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Internasional (ICJ) menawarkan potensi sebagai alat yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak Rohingya, meskipun terdapat berbagai hambatan dan tantangan. Prosedur ICJ dapat membantu mengamankan bantuan awal bagi Rohingya dan membuka peluang untuk mendebat kompensasi yang memadai di forum internasional. Sistem hak asasi manusia yang terfragmentasi di antara pengadilan domestik, lembaga regional, dan sistem PBB mengakibatkan penegakan norma HAM yang tidak konsisten. Meskipun ICJ tidak akan pernah menjadi 'pengadilan hak asasi manusia' dalam arti sebenarnya, ICJ dapat mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggar hak asasi manusia, dan kasus Rohingya dapat menjadi titik awal yang penting.</p>
Perbandingan Penelitian	<p>Persamaan:</p> <p>Penelitian memiliki beberapa persamaan yaitu fokus pada penegakan hak asasi manusia di forum internasional, serta membahas peran dari sebuah organisasi dalam upaya mencari keadilan internasional bagi korban pelanggaran HAM.</p> <p>Perbandingan:</p>

		Penelitian yang dilakukan oleh Lee J.F. Deppermann menganalisis potensi Mahkamah Internasional (ICJ) untuk meningkatkan pengaruhnya sebagai pengadilan HAM dengan fokus pada kasus Rohingya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mempelajari upaya <i>Amnesty International</i> dalam mengadvokasi hak asasi manusia ke masyarakat internasional pada kasus <i>extrajudicial killings</i> di Venezuela.
--	--	---

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
3.	Nama Peneliti	Muhammad Rafli Lubis, Hasbi Aswar
	Judul Penelitian	Peran PBB Menangani Pelanggaran HAM dalam Konflik Suriah Tahun 2013 – 2018
	Sumber Penelitian	Hassanudin Journal of International Affairs Volume 2, No. 2
	Tahun Penelitian	2022
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik Suriah berkepanjangan menghadirkan kompleksitas bagi PBB dalam menjalankan peran perdamaian dan penegakan HAM. Upaya PBB dalam menciptakan perdamaian di Suriah terhambat oleh kepentingan politik negara-negara anggota PBB, serta sulitnya mencapai kesepakatan antar aktor yang terlibat dalam konflik. PBB telah berupaya melakukan pemantauan pelanggaran HAM, bantuan kemanusiaan, perlindungan masyarakat sipil, koordinasi dengan Dewan Keamanan, hingga memfasilitasi gencatan senjata. Upaya yang dilakukan memberikan beberapa hasil positif, namun konflik Suriah masih jauh dari selesai dan masih

		menghadapi banyak tantangan dalam mencapai perdamaian dan penegakan HAM.
	Perbandingan Penelitian	<p>Persamaan:</p> <p>Kedua penelitian ini meneliti isu pelanggaran HAM dalam konteks internasional, membahas peran aktor non-negara dalam menangani pelanggaran HAM, dan memiliki tujuan untuk mempromosikan keadilan internasional bagi korban pelanggaran.</p> <p>Perbandingan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafli Lubis dan Hasbi Aswar menganalisis peran PBB pada tingkat global, dan temuan penelitian berfokus pada efektivitas peran PBB dalam menangani pelanggaran HAM di Suriah. Sedangkan penulis berfokus pada <i>Amnesty International</i> dalam kasus <i>extrajudicial killings</i> di Venezuela dan melihat upaya yang dilakukan dalam strategi advokasi HAM.</p>

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
4.	Nama Peneliti	Arief Fahmi Lubis, Kalijunjung Hasibuan, Paramita Andiani
	Judul Penelitian	Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
	Sumber Penelitian	Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol.02, No.10
	Tahun Penelitian	2023

Hasil Penelitian	<p>Penelitian ini mengeksplorasi hubungan kompleks antara hukum hak asasi manusia internasional dan tantangan praktis dalam penegakannya dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum HAM internasional memainkan peran penting dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku dan mencari keadilan bagi korban. Penerapan kerangka hukum HAM internasional dihadapkan berbagai tantangan termasuk isu hukum dan yuridiksi, pertimbangan politik, faktor budaya dan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum HAM internasional dan realitas lokal sangat penting untuk mencapai keadilan bagi korban kejahatan terhadap kemanusiaan.</p>
Perbandingan Penelitian	<p>Persamaan:</p> <p>Persamaan dalam penelitian ini fokus pada isu HAM dengan implementasi hukum internasional HAM dan upaya organisasi internasional dalam penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan, menekankan aspek penegakan HAM, dan memiliki tujuan untuk mempromosikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.</p> <p>Perbandingan:</p> <p>Penelitian yang ditulis oleh Arief Fahmi Lubis, Kalijunjung Hasibuan, dan Paramita Andiani menganalisis isu HAM dari perspektif global dengan fokus pada implementasi hukum internasional HAM serta fokus pada temuan terkait tantangan dalam implementasi hukum HAM internasional. Sementara penulis memiliki fokus pada upaya <i>Amnesty</i></p>



		<i>International</i> di tingkat nasional Venezuela dan berfokus pada temuan terkait strategi <i>Amnesty International</i> dalam melawan segala bentuk pelanggaran HAM dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku.
--	--	--

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
5.	Nama Peneliti	M. Hafizh Nabiyyin, Stivani Ismawira Sinambela
	Judul Penelitian	Peran <i>Amnesty International</i> Pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi <i>Human Rights Defender</i> di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman
	Sumber Penelitian	Papua Journal of Diplomacy and International Relations Volume 3, Issue 1
	Tahun Penelitian	2023
	Hasil Penelitian	Dalam penelitian yang dibuat oleh M. Hafizh Nabiyyin dan Stivani Ismawira Sinambela menyimpulkan bahwa <i>Amnesty International</i> memiliki peran yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia terutama dalam konteks kebebasan berekspresi. <i>Amnesty International</i> Indonesia, dalam kasus yang diangkat, berperan sebagai jejaring advokasi transnasional yang mendukung kebebasan berekspresi pembela hak asasi manusia di Indonesia. Namun meskipun telah melakukan tekanan terhadap pemerintah Indonesia melalui berbagai cara termasuk dengan dukungan dari masyarakat internasional dan pernyataan dari pakar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), <i>Amnesty International</i> Indonesia belum berhasil sepenuhnya mempengaruhi pemerintah untuk menghentikan kasus yang terjadi.

		Dampak yang dihasilkan masih terbatas pada pengembangan wacana revisi UU ITE.
	Perbandingan Penelitian	<p>Persamaan:</p> <p>Kedua penelitian menekankan peran sentral <i>Amnesty International</i>, dalam konteks perlindungan dan advokasi hak asasi manusia (HAM). Dimana keduanya mengkaji upaya dalam mencari keadilan internasional terkait pelanggaran HAM, dengan mempertimbangkan strategi hukum, kampanye advokasi, dan aktivisme.</p> <p>Perbandingan:</p> <p>Penelitian yang ditulis oleh M. Hafizh Nabiyyin dan Stivani Ismawira Sinambela spesifik mengkaji peran <i>Amnesty International</i> dalam konteks pembatasan kebebasan berekspresi terhadap pembela HAM di Indonesia, sedangkan peneliti ingin mengulas upaya <i>Amnesty International</i> dalam mengadvokasi HAM terkait kasus <i>extrajudicial killings</i> selama periode 2017-2021.</p>

## 2.2 Landasan Teori

Dalam konteks hubungan internasional, teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) menawarkan perspektif tentang bagaimana aktor-aktor non negara seperti organisasi non pemerintah, media, dan aktivis hak asasi manusia bekerja secara kolaboratif lintas batas negara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah serta aktor internasional lainnya. Melalui jaringan advokasi transnasional, aktor-aktor domestik yang sering kali terpinggirkan mendapatkan akses ke komunitas internasional,

memungkinkan advokasi yang lebih efektif sekaligus memperkuat peluang akses terhadap mekanisme penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.

Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink pada tahun 1998, yang menyoroti pentingnya jaringan advokasi dalam mempromosikan isu-isu global seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. *Transnational Advocacy Network* (TAN) merupakan jaringan aktivis yang terbentuk berdasarkan kesamaan ide atau nilai, bersifat lintas negara, dan melibatkan berbagai aktor. Jaringan ini dapat mencakup organisasi non-pemerintah (NGO), gerakan sosial lokal, media, organisasi antarpemerintah, serta aktor-aktor lainnya. Tujuan utama TAN adalah mempengaruhi perubahan sikap suatu negara atau organisasi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, TAN menggunakan strategi *framing issue* yaitu dengan mengemas isu tertentu agar menarik perhatian masyarakat luas, sehingga tekanan terhadap pihak yang menjadi target advokasi dapat meningkat. Keunggulan TAN terletak pada kemampuannya dalam mengelola dan menyebarkan informasi secara efektif dalam sistem internalnya, yang memungkinkan mereka memperkuat upaya advokasi secara global (Keck & Sikkink, *Activist Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics*, 1998).

Selain itu dinyatakan juga bahwa advokasi adalah upaya yang dilakukan oleh suatu entitas untuk memengaruhi kebijakan tertentu. Advokasi ini juga mencakup usaha yang sistematis dan terorganisir dalam membangun jaringan transnasional yang bertujuan untuk memengaruhi, mendesak, dan memberikan tekanan agar terjadi perubahan dalam proses pengambilan kebijakan (Azura & Trianda, 2023). Saat ini advokasi dianggap penting dalam menangani isu-isu global seperti hak asasi manusia,

kesehatan, dan lingkungan, dimana masyarakat global dapat mengembangkan kesadaran dan sudut pandang yang serupa terhadap isu-isu yang berdampak pada keberlanjutan kehidupan manusia.

Dalam teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink, terdapat 4 (empat) taktik utama yang diadopsi oleh jaringan ini untuk memengaruhi kebijakan dan norma internasional (Keck & Sikkink, *Activist Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics*, 1998). Keempat taktik tersebut meliputi:

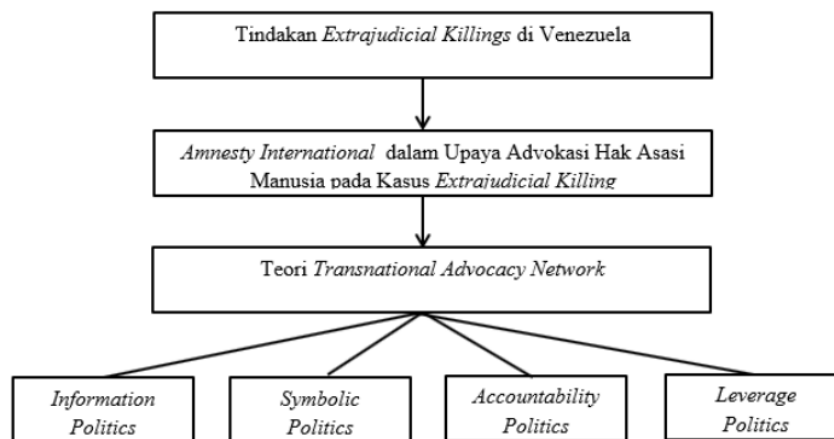
1. *Information politics*, yaitu kemampuan TAN untuk secara strategis mengumpulkan, menyebarluaskan, dan memanfaatkan informasi. Informasi ini disebar di tingkat global dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap isu-isu penting, seperti pelanggaran hak asasi manusia. Dengan membingkai isu-isu secara spesifik serta menyampaikan fakta kepada publik dan para pembuat kebijakan, TAN berupaya memobilisasi perhatian internasional dan mendorong tindakan konkret.
2. *Symbolic politics*, yang melibatkan penggunaan simbol atau peristiwa yang dikenali secara luas untuk menggambarkan situasi yang kompleks dengan tujuan membangkitkan emosi dan menarik perhatian publik. Taktik ini sering kali menggunakan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagai ikon atau representasi dari masalah yang lebih besar, misalnya melalui penggunaan foto, testimoni korban, atau kampanye internasional yang berorientasi simbolis.
3. *Leverage politics*, dimana TAN memanfaatkan aktor atau institusi internasional yang memiliki kekuatan untuk menekan pemerintah atau aktor

lainnya yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dengan memobilisasi negara-negara atau organisasi internasional yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, atau militer, TAN meningkatkan tekanan terhadap negara-negara yang melakukan pelanggaran agar mematuhi norma-norma internasional.

4. *Accountability politics*, yang bertujuan untuk menuntut pemerintah agar mematuhi komitmen yang telah mereka buat di tingkat nasional maupun internasional. Taktik ini memanfaatkan perjanjian, janji, atau kebijakan yang sudah disepakati oleh negara atau aktor tertentu, dan digunakan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



### 2.4 Argumentasi Utama

Venezuela telah mengalami krisis hak asasi manusia yang parah, ditandai dengan peningkatan kasus eksekusi <sup>4</sup> di luar hukum (*extrajudicial killing*) yang dilakukan oleh

aparatus keamanan negara. Rezim otoriter yang berkuasa telah menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketakutan dan ketidakadilan, dimana warga sipil terutama yang dianggap sebagai oposisi pemerintah, menjadi sasaran pelanggaran HAM. Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin memperparah situasi, memicu kemiskinan massal, dan migrasi dalam skala besar.

Dalam menghadapi krisis ini, *Amnesty International* telah memainkan peran sentral dalam mendokumentasikan dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Venezuela, termasuk di dalamnya kasus *extrajudicial killing*. Melalui penelitian mendalam, *Amnesty International* telah berhasil mengungkap pola pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh aparat keamanan negara. Laporan-laporan *Amnesty International* telah menjadi bukti kuat yang digunakan untuk mendesak komunitas internasional agar mengambil tindakan.

Pendekatan *Amnesty International* sejalan dengan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN), dimana organisasi ini telah berhasil membangun jaringan yang luas dengan berbagai aktor, baik di dalam maupun di luar Venezuela, untuk bersama-sama mendorong perubahan. Melalui jaringan ini, *Amnesty International* dapat berbagi informasi, sumber daya, dan strategi advokasi. *Amnesty International* telah menggunakan berbagai strategi advokasi termasuk pembinaan jaringan, advokasi kebijakan, kampanye publik, hingga menyediakan bantuan hukum kepada korban dan keluarganya. Selain itu, *Amnesty International* juga memanfaatkan kekuatan narasi (*framing*) untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan. Sehingga dengan menyajikan bukti-bukti pelanggaran HAM yang kuat, organisasi ini berhasil menciptakan kesadaran global tentang krisis di Venezuela.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 *Amnesty International*

##### 4.1.1 Sejarah *Amnesty International*

*Amnesty International* merupakan organisasi non-pemerintah nirlaba yang berfokus pada isu hak asasi manusia dengan cakupan global. Didirikan pada tahun 1961 oleh Peter Benenson, seorang pengacara berkebangsaan Inggris, *Amnesty International* didasari oleh keyakinan bahwa setiap individu berhak atas hak asasi manusia fundamental, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, atau status lainnya. Sebagai gerakan global dengan lebih dari 10 juta anggota, *Amnesty International* berkomitmen untuk mewujudkan masa depan dimana hak asasi manusia dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia (amnesty.org, Amnesty International, n.d).

Pada tahap awal pendiriannya, *Amnesty International* memfokuskan upaya pada pembebasan tahanan, yaitu individu yang dipenjara karena keyakinan, pendapat, atau ekspresi mereka. *Amnesty International* menggunakan berbagai strategi seperti kampanye publik, lobi pemerintah, dan tekanan internasional untuk membebaskan tahanan-tahanan ini. Seiring perkembangan waktu, *Amnesty International* memperluas cakupan fokusnya untuk mencakup berbagai pelanggaran HAM lainnya termasuk penyiksaan, hukuman mati, dan diskriminasi. Selain itu, organisasi ini juga mulai aktif

mempromosikan hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

#### **4.1.2 Makna Lambang Amnesty International**

*Amnesty International* memiliki lambang dengan latar belakang berwarna kuning, terdiri dari 2 (dua) elemen utama yaitu lilin dan kawat berduri, serta terdapat tulisan *Amnesty International* sebagai identitas utama pada sebelah kiri logo. Kombinasi lilin dan kawat berduri melambangkan perjuangan untuk hak asasi manusia, dimana lilin yang menyala di atas duri menunjukkan bahwa meskipun ada banyak rintangan dan hambata, *Amnesty International* berkomitmen untuk terus menerangi jalan menuju keadilan dan kebebasan (amnesty.org, Amnesty International, n.d).

Sehingga, secara detail makna lambang dari *Amnesty International* yaitu:

1. Lilin berduri, melambangkan harapan di tengah kegelapan. Lilin mewakili cahaya pengetahuan dan pemahaman, sedangkan duri melambangkan penderitaan dan penindasan yang dialami oleh banyak orang di seluruh dunia. Lilin yang menyala menunjukkan bahwa meskipun kegelapan menyelimuti dunia, harapan akan perubahan dan keadilan selalu ada.
2. Kawat berduri, melambangkan hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh para pembela hak asasi manusia. Kawat berduri juga mewakili rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh para korban pelanggaran hak asasi manusia. Penggunaan kawat berduri dimaksudkan untuk mengingatkan kita mengenai kebrutalan



pelanggaran hak asasi manusia dan untuk menegaskan komitmen organisasi untuk melawannya.

#### 4.1.3 Visi dan Misi *Amnesty International*

Berdasarkan *Statute of Amnesty International* (amnesty.org, Amnesty International, 2019) visi dan misi AI adalah sebagai berikut:

##### Visi

*Amnesty International* memiliki visi untuk menciptakan dunia dimana setiap individu dapat menikmati hak asasi manusia yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan standar hak asasi manusia lainnya yang diakui secara internasional. Visi ini mencerminkan komitmen organisasi untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan aman bagi semua orang, dimana hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.

##### Misi

1. Melakukan penelitian dan advokasi untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia;
2. Mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia bagi semua orang, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, atau status lainnya;
3. Memberdayakan individu dan komunitas untuk mengambil tindakan dalam rangka melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia;
4. Membangun gerakan global yang kuat untuk hak asasi manusia.

#### 4.1.4 Tujuan Amnesty International

*Amnesty International* memiliki beberapa tujuan spesifik untuk mencapai misinya (amnesty.org, Amnesty International, 2019), termasuk:

1. Mencegah dan mengakhiri pelanggaran hak sipil dan politik;
2. Mempromosikan hak ekonomi, sosial, dan budaya;
3. Melindungi hak perempuan dan anak-anak;
4. Memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

#### 4.2 Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak dan kebebasan merupakan anugerah yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir. Hak asasi manusia merujuk pada hak-hak fundamental yang dimiliki individu semata-mata karena ia adalah manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia telah ada sejak manusia diciptakan, karena syarat untuk memilikinya hanya satu, yaitu eksistensi sebagai manusia. Menurut *Universal Declaration of Human Rights* hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak fundamental yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir dan berlaku secara universal tanpa diskriminasi, hak yang dicakup mulai dari hak-hak dasar seperti hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, hingga hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan beragama dan berpendapat, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pendidikan dan pekerjaan (ohchr.org, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, n.d).

Akar sejarah konsep hak asasi manusia modern dapat ditelusuri kembali ke era revolusi yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Gejolak revolusioner ini menjadi cikal bakal bagi perkembangan pemikiran tentang HAM,

dimana masyarakat dunia internasional mulai mendambakan sistem hukum yang lebih humanis dan berfokus pada pernghormatan terhadap hak-hak individu. Perubahan sosial dan politik yang signifikan selama periode tersebut turut mendorong munculnya kesadaran akan pentingnya HAM. Masyarakat mulai mempertanyakan sistem feodalisme dan absolutism yang menindas, serta menuntur adanya sistem yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan bagi semua individu.

Munculnya konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di Eropa secara historis dapat ditelusuri kembali ke penandatanganan *Magna Carta* pada abad ke-13. Dokumen monumental ini menandai titik balik signifikan dalam sejarah konstitusionalisme, dimana kekuasaan absolut monarki mulai dibatasi. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada abad ke-17 yang semakin memperkuat pembatasan kekuasaan monarki dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Pada periode yang sama, muncul *adagium* “*equality before the law*” yang menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Pemikiran para filsuf seperti Rousseau dan Montesquieu turut mewarnai perkembangan HAM. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, yang terinspirasi oleh pemikiran mereka, menegaskan hak-hak alamiah manusia yang melekat sejak lahir. Puncak dari perkembangan HAM adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis tahun 1789. Deklarasi ini secara rinci merumuskan berbagai hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan, persamaan, dan keamanan (Imran, 2019).

Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang diadopsi oleh Prancis pada tahun 1789 menjadi tonggak penting dalam perkembangan HAM. Dokumen bersejarah ini secara eksplisit menyatakan hak-hak fundamental yang dimiliki setiap

manusia, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Perkembangan selanjutnya diwarnai dengan berbagai perjuangan dan gerakan sosial yang memperjuangkan HAM di berbagai belahan dunia. Hal ini berujung pada pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, yang menetapkan standar minimum universal untuk perlakuan manusia, dan menjadi landasan moral dan hukum internasional bagi upaya global untuk melindungi hak-hak fundamental setiap individu (Arifin, 2019).

#### 4.2.1 *Extrajudicial Killings*

Dalam konteks penegakan <sup>3</sup> hak asasi manusia (HAM), salah satu bentuk pelanggaran yang paling serius dan menjadi sorotan internasional adalah tindakan eksekusi di luar hukum atau *extrajudicial killings*. *Extrajudicial killings* tindakan penggunaan kekuatan mematikan yang dilakukan secara sengaja, terencana, dan sistematis. Tindakan ini dilakukan oleh negara atau perantara yang bertindak atas nama negara, serta oleh kelompok bersenjata terorganisir dalam situasi konflik bersenjata, terhadap individu-individu tertentu yang tidak berada dalam tahanan pelaku (Alston, 2010). *Extrajudicial killings* adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat negara yang mengakibatkan kematian seseorang tanpa melalui prosedur hukum sah yang tidak dilakukan dalam rangka membela diri atau sebagai bagian dari pelaksanaan perintah yang diatur oleh undang-undang.

*Extrajudicial killings* tidak hanya melanggar hak atas kehidupan yang merupakan hak fundamental yang dijamin oleh berbagai instrument HAM internasional, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam melindungi warga negara. Kegagalan untuk mengadili para pelaku eksekusi di luar hukum menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan seringkali disertai dengan impunitas. Upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus ini memerlukan kerja sama erat antara lembaga internasional, pemerintah,

dan organisasi masyarakat sipil, serta reformasi yang mendalam dalam sistem peradilan dan penegakan hukum, Penguatan mekanisme akuntabilitas serta pemberian akses keadilan bagi para korban merupakan langkah krusial dalam menghentikan praktik ini dan memastikan bahwa hak atas kehidupan sebagai hak fundamental setiap individu dapat terlindungi secara efektif.

#### **4.3 Pelanggaran Tindak *Extrajudicial Killings* di Venezuela**

Kasus *extrajudicial killings* di Venezuela telah menjadi perhatian serius di tingkat internasional khususnya dalam konteks krisis politik dan sosial yang berkepanjangan. Laporan dari berbagai organisasi internasional, termasuk *Amnesty International*, menunjukkan bahwa praktik eksekusi di luar hukum ini dilakukan secara sistematis dan sering kali tanpa adanya akuntabilitas hukum. Kejahatan ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang meluas, dimana aparat negara menggunakan kekuatan mematikan tanpa proses peradilan yang sah.

Sejak dibentuknya Pasukan Aksi Khusus Venezuela atau *Fuerza de Acciones Especiales* (FAES) sebagai bagian dari Kepolisian Nasional Bolivarian pada tahun 2017, anggota polisi dalam satuan ini telah terlibat dalam pelanggaran HAM serius yang seringkali tidak disertai dengan penegakan hukum yang memadai. Praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di wilayah masyarakat berpenghasilan rendah mengikuti pola yang ditemukan oleh *Human Rights Watch* dan organisasi HAM Venezuela pada tahun 2016. Temuan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran meluas oleh pasukan keamanan terhadap warga sipil selama pelaksanaan “Operasi Pembebasan Rakyat” atau *Operacion de Liberacion y Proteccion del Pueblo* (OLP) (HRW.org, 2019).

Pasukan Aksi Khusus (FAES) bertanggungjawab atas kematian 5.287 orang pada tahun 2018, serta 1.569 korban lainnya hingga pertengahan 2019 dalam Operasi Pembebasan Rakyat (OLP) (Cumming-Bruce, 2019). Dalam laporan terkait Operasi Pembebasan Rakyat (OLP), yang awalnya dibentuk untuk memberantas kejahatan, para ahli yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa meninjau 140 operasi yang dilaporkan mengakibatkan kematian 413 orang dimana diantaranya ditembak dari jarak dekat. OLP biasanya mengerahkan ratusan petugas bersenjata ke suatu area, seringkali menggunakan kendaraan lapis baja dan helikopter. Tindakan ini merupakan bagian untuk menghilangkan kelompok masyarakat yang dianggap tidak diinginkan, dengan dalih pemberantasan kriminalitas dengan mayoritas korban adalah laki-laki muda yang menjadi sasaran berdasarkan dugaan atau keterlibatan dalam aktivitas kriminal (UN.org, 2020).

Kasus *extrajudicial killings* di Venezuela mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, terutama sejak tahun 2017 ketika pemerintah meningkatkan tindakan represif untuk mempertahankan kekuasaan. Metode yang sering digunakan oleh pasukan keamanan termasuk eksekusi langsung terhadap korban, manipulasi tempat kejadian perkara untuk mengesankan bahwa korban bersenjata, dan tidak terkecuali adanya intimidasi terhadap keluarga korban. Dalam beberapa kasus, tindakan ini digunakan untuk menanamkan rasa takut di masyarakat dan mempertahankan kontrol sosial (HRW.org, 2019).

Keluarga korban dan organisasi masyarakat sipil di Venezuela telah berjuang keras untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dirampas secara paksa. Organisasi HAM lokal seperti *Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos* (Provea) dan *Foro Penal Venezolano* menajadi sumber utama

informasi mengenai pelanggaran HAM di lapangan yang kemudian menjadi dasar laporan internasional (cfj.org, 2024). Beberapa keluarga dari korban melakukan aksi protes untuk menuntut akuntabilitas dan juga bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memberikan tekanan kepada pemerintah.

Meskipun ada upaya dari masyarakat lokal dan keluarga korban untuk memperjuangkan hak-hak mereka, sistem peradilan domestik yang lemah dan kontrol pemerintah menjadi hambatan utama. Dukungan dari organisasi internasional dan yuridiksi asing telah memberikan harapan baru untuk keadilan meskipun hasil konkret masih terbatas. Hadirnya *Amnesty International* memperbesar skala perhatian internasional dengan membangun dukungan diplomatik, dan menciptakan tekanan sistematis terhadap pemerintah Venezuela melalui laporan dan advokasi yang terstruktur.

Respons dunia internasional terhadap isu *extrajudicial killings* di Venezuela menunjukkan keprihatinan yang mendalam dari berbagai aktor, termasuk negara-negara demokratis, organisasi internasional, dan lembaga HAM global. Dewan HAM PBB membentuk Misi Pencari Fakta pada 2019 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang mencakup eksekusi di luar hukum. Laporan yang dihasilkan kemudian mengungkapkan pola pelanggaran HAM sistematis oleh pasukan keamanan Venezuela dan menyerukan akuntabilitas rezim Nicolas Maduro. Laporan ini menjadi dasar penyelidikan formal oleh Mahkamah Pidana Internasional, yang pada tahun 2021 meluncurkan investigasi resmi terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk di dalamnya kasus *extrajudicial killings*. Penyelidikan ini didukung oleh bukti dari *Amnesty International*, Misi Pencari Fakta, dan organisasi

HAM lokal yang menyoroti peran aparat keamanan seperti FAES dan keterkaitannya dalam pelanggaran yang terjadi (United Nations Human Rights, 2018).

Dari sisi negara-negara, Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat tinggi Venezuela, yang mana di dalamnya mencakup pembuatan sistem untuk pembekuan aset dan larangan perjalanan untuk menekan pemerintah dalam menghentikan pelanggaran HAM (VOA Indonesia, 2017). Amerika Serikat mengambil langkah serupa dengan menerapkan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap pejabat keamanan, sekaligus menyerukan pembubaran FAES yang dianggap sebagai alat represi negara (Roy, 2022). Secara keseluruhan, respons dunia internasional mencakup tindakan konkret seperti penyelidikan ICC dan sanksi oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Meski begitu, efektivitas langkah-langkah ini masih terbatas karena pemerintah Venezuela menolak akuntabilitas dan menekan organisasi HAM lokal yang mengakibatkan lambatnya keadilan bagi korban.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### <sup>1</sup> 5.1 *Information Politics*

*Information politics* merupakan salah satu taktik yang terdapat dalam *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang memanfaatkan kemampuan mengumpulkan, menyebarkan, serta menggunakan informasi dengan cepat dan efisien, terutama informasi yang secara politik dapat diterima oleh berbagai pihak. Melalui pendekatan ini, TAN berupaya memperjelas dan menyederhanakan kompleksitas masalah, sehingga isu-isu yang diangkat dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas dan mendorong respons publik maupun politik yang lebih efektif (Keck & Sikkink, *Transnational advocacy networks in international and regional politics*, 1999).

*Amnesty International* berperan signifikan dalam menyajikan informasi terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Venezuela, khususnya mengenai *extrajudicial killings* yang dilakukan oleh aparat keamanan negara. Taktik *information politics* yang pertama kali diterapkan oleh *Amnesty International* dalam konteks ini adalah pengumpulan dan penyebaran laporan hasil investigasi independen yang mendokumentasikan pelanggaran HAM tersebut. *Amnesty International* memusatkan upaya ini pada pengumpulan data dari sumber-sumber lapangan, termasuk korban, keluarga korban, saksi mata, serta organisasi HAM lokal yang memiliki akses langsung terhadap kejadian. *Amnesty International* melakukan penelitian terperinci yang dilakukan pada tahun 2019 dengan fokus pada pelanggaran hak asasi manusia sistematis termasuk di dalamnya eksekusi <sup>4</sup> di luar hukum yang

dilakukan oleh aparat keamanan negara. Hasil temuan dari investigasi tersebut kemudian disebarluaskan secara global dengan tujuan memberikan tekanan kepada aktor internasional agar mengambil langkah tegas.

*Amnesty International* mempublikasikan laporan berjudul “*This Is No Way to Live: Public Security and Right to Life in Venezuela*” pada tahun 2018 yang merupakan salah satu inisiatif awal yang dilakukan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kasus eksekusi di luar proses hukum dan ditemukan bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan seringkali dilakukan oleh pihak keamanan dalam *Operacion de Liberacion del Pueblo* (OLP) yang dirancang untuk memerangi kejahatan. Data resmi menunjukkan bahwa antara 2015 hingga Juni 2017 terjadi 8.292 dugaan eksekusi di luar hukum dengan angka yang terus meningkat tiap tahunnya, Dilaporkan pada tahun 2015 terdapat 1.777 kasus dugaan eksekusi di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan, yang mencakup sekitar 10% dari total pembunuhan di Venezuela. Pada 2016 tercatat 4.667 orang tewas di tangan aparat keamanan dimana angka ini menyumbang 22% dari total pembunuhan di negara tersebut. Kemudian pada paruh pertama tahun 2017, dari Januari hingga Juni, tercatat 1.848 kasus eksekusi di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan (*amnesty.org*, *This Is No Way to Live: Public Security and Right to Life in Venezuela*, 2018).

Selain itu laporan berjudul “*Hunger for Justice: Crimes against Humanity in Venezuela*” yang diterbitkan pada Mei 2019 menjelaskan dalam laporan ini tercatat setidaknya 11 orang tewas akibat eksekusi di luar proses hukum selama protes Januari 2019 yang dilakukan oleh pasukan keamanan negara khususnya oleh *Fuerzas de Acciones Especiales* (FAES), dimana korban-korban kebanyakan adalah pemuda

yang tinggal di lingkungan berpenghasilan rendah. Pasca eksekusi, pemerintah seringkali berupaya menggambarkan para korban sebagai kriminal yang tewas dalam baku tembak dengan pasukan keamanan meskipun banyak saksi mata yang melaporkan bahwa para korban sudah ditahan sebelum dibunuh dan dalam beberapa kasus pihak keamanan memalsukan bukti dan mengganggu tempat kejadian perkara untuk menutupi fakta sebenarnya (amnesty.org, *Hunger for Justice: Crimes against Humanity in Venezuela*, 2019).

Selain itu, *Amnesty International* melakukan kolaborasi dengan media internasional untuk memperluas jangkauan informasi. Laporan mengenai pelanggaran yang mereka kumpulkan sering diangkat di berbagai platform berita global yang kredibel, seperti *BBC News*, *The New York Times*, *The Guardian*, *Al Jazeera*, sehingga meningkatkan eksposur dan tekanan pada pihak-pihak terkait. *Amnesty International* pun turut melakukan verifikasi terhadap 9 (sembilan) video aparat keamanan Venezuela melakukan baku tembak yang diyakini merupakan tindakan eksekusi di luar hukum pada Januari 2021 dan memublikasikannya pada laman *website* sehingga informasi yang diberikan mendapatkan paparan yang lebih luas sehingga meningkatkan tekanan pada pemerintah Venezuela untuk menanggapi kasus tersebut (amnesty.org, *Amnesty International*, 2021).

Taktik yang dilakukan *Amnesty International* membangun kredibilitas di tingkat internasional melalui penyampaian informasi yang terverifikasi. Laporan-laporan yang dihasilkan kemudian disebarluaskan secara luas melalui platform daring, kampanye di media sosial, serta melalui kerja sama dengan organisasi internasional yang bertujuan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Venezuela agar bertanggungjawab atas pelanggaran yang terjadi.

Dalam kasus Venezuela, *Amnesty International* menggunakan pendekatan ini dengan tujuan menyoroti kasus tindakan eksekusi <sup>4</sup> di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan negara. Melalui taktik ini, *Amnesty International* mengumpulkan, memvalidasi, dan mendistribusikan informasi yang relevan melalui laporan-laporan resmi, wawancara dengan korban, serta kerja sama dengan organisasi lokal untuk mengungkap pola pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh aparat keamanan Venezuela.

*Amnesty International* memobilisasi opini publik global dan menciptakan tekanan politik internasional. Penyebaran informasi kredibel telah berhasil meningkatkan perhatian internasional mengenai isu yang sedang terjadi di Venezuela sehingga menarik perhatian global dan mengarahkan negara-negara serta organisasi internasional untuk lebih peka terhadap situasi hak asasi manusia di Venezuela, yang mana sering kali mendapatkan liputan dalam media internasional dan menjadi agenda penting dalam berbagai forum diskusi global. Dengan laporan-laporan yang disebar, *Amnesty International* juga mendorong lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mempertimbangkan penyelidikan resmi terhadap pemerintah Venezuela atas dugaan pelanggaran HAM berat. Selain itu, beberapa negara di Amerika Latin, Eropa, dan Amerika Serikat mengkritik pemerintah Venezuela secara terbuka, bahkan memberlakukan sanksi politik atau ekonomi sebagai bentuk tekanan terhadap rezim Nicolas Maduro. Tindakan ini bertujuan untuk memperingatkan pemerintah agar mengurangi penggunaan kekerasan dan mempertanggungjawabkan aparat yang terlibat (European Parliament, 2017).

Namun, meskipun taktik ini berdampak dalam meningkatkan perhatian global dan tekanan internasional, efektivitasnya dalam menekan pemerintah

Venezuela untuk bertanggungjawab secara langsung atas kasus-kasus ini masih terbatas. Pemerintah Venezuela sering kali menolak laporan-laporan yang dikeluarkan oleh *Amnesty International* dengan menyebutnya sebagai bentuk campur tangan asing. Sebagai pengendali media domestik, pemerintah juga berupaya mengontrol narasi publik dan menolak akuntabilitas atas tindakannya (*Amnesty International*, 2022). Di sisi lain, struktur impunitas di Venezuela memungkinkan aparat keamanan yang terlibat dalam *extrajudicial killings* mendapat perlindungan dari sistem hukum, sehingga sulit untuk menuntut pertanggungjawaban langsung.

Strategi ini cenderung fokus kepada penyebaran informasi ke tingkat global dan bergantung pada respons dari komunitas internasional untuk menciptakan tekanan terhadap Venezuela. Sehingga apabila respons yang diberikan tidak konsisten, dampak informasi yang disebarkan menjadi kurang signifikan

## <sup>1</sup> 5.2 *Symbolic Politics*

*Symbolic politics* merupakan strategi advokasi yang memanfaatkan simbol-simbol untuk menyoroti dan memperjelas momen-momen krusial dalam isu yang sedang diperjuangkan. Simbol ini berfungsi sebagai alat komunikasi visual dan naratif yang memudahkan masyarakat untuk memahami kompleksitas masalah yang dihadapi, sekaligus meningkatkan daya ingat dan kesadaran massa terhadap isu tersebut. Oleh karena itu, taktik ini tidak hanya menjadi representasi visual tetapi juga sebagai alat mobilisasi yang mampu memengaruhi opini publik dan memperkuat solidaritas dalam mencapai tujuan gerakan sosial (*Claudia*, 2022).

*Amnesty International* secara konsisten memanfaatkan *symbolic politics* dengan menyoroti kasus-kasus simbolis guna menarik perhatian internasional dan meningkatkan kesadaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang

terjadi di Venezuela. Taktik ini berfungsi dengan mengangkat kisah individu atau kelompok korban yang menjadi representasi dari krisis yang lebih luas, sehingga dapat memicu respons emosional dan moral dari publik serta komunitas internasional. Salah satu pendekatan awal dan sering digunakan oleh *Amnesty International* adalah menyoroiti kasus-kasus ekstrem dan berprofil tinggi yang melibatkan korban *extrajudicial killings*, termasuk kisah-kisah pribadi dari keluarga korban dan saksi mata.

*Amnesty International* merilis laporan investigasi yang didukung dengan dokumentasi visual seperti foto, video, dan infografis yang menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Venezuela. Konten visual ini memperlihatkan kondisi korban dan metode kekerasan yang digunakan, sehingga menggugah emosi pembaca dan menarik perhatian masyarakat internasional untuk mendukung advokasi HAM.

Kasus kematian pemuda dan demonstran yang menjadi simbol penindasan oleh rezim Nicolas Maduro seperti yang diungkapkan dalam laporan berjudul "*Hunger for Justice: Crimes against Humanity in Venezuela*". Salah satu kisah pribadi yang disorot dalam laporan tahunan ini adalah kasus Luis Enrique Ramos Suarez yang tewas pada 24 Januari 2019 sehari setelah terlibat dalam demonstrasi menentang pemerintahan Nicolas Maduro di kota Caroca, Venezuela (amnesty.org, *Hunger for Justice: Crimes against Humanity in Venezuela*, 2019). Melalui narasi ini, mereka dapat memperkuat argumen mengenai perlunya tindakan kolektif terhadap pemerintah Venezuela, sekaligus menciptakan rasa urgensi yang mendesak di antara audiens internasional.

Selain itu, salah satu tanggal penting yang menjadi momentum besar sehingga menjadi simbol dalam kasus *extrajudicial killings* di Venezuela adalah 30 April 2019 yang dikenal sebagai Operasi Guaido atau Pemberontakan La Carlota. Aksi protes besar-besaran yang dilakukan oleh pemimpin oposisi, Juan Guaido, untuk menggulingkan rezim Nicolas Maduro memicu bentrok besar antara aparat keamanan dan pendukung oposisi. Tanggal ini menjadi sorotan global karena mencerminkan eskalasi kekerasan negara terhadap oposisi dan masyarakat sipil yang mencakup tindakan represif serta pelanggaran HAM serius, termasuk *extrajudicial killings*. Media internasional meliput kejadian ini secara luas yang menjadikan Venezuela sebagai pusat perhatian global terkait pelanggaran HAM (Walsh, Gallon, & John, 2019).

Penggunaan simbol visual seperti ini berfungsi untuk menggambarkan penderitaan yang dialami dan menarik perhatian media sosial. Sehingga *Amnesty International* tidak hanya berfungsi sebagai penyaji informasi, tetapi juga sebagai katalisator untuk mobilisasi masyarakat global dan advokasi hak asasi manusia, mendorong respons yang lebih koheren terhadap pelanggaran yang terjadi. *Amnesty International* menggunakan taktik ini dengan mengangkat kasus-kasus simbolis yang merepresentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas dari kisah para demonstran yang tewas dalam operasi aparat keamanan Venezuela. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan respons emosional dari audiens global dengan menampilkan korban sebagai simbol perlawanan terhadap rezim represif.

Dalam kasus ini, *Amnesty International* memanfaatkan kekuatan narasi dan visualisasi tidak hanya untuk menyampaikan informasi tetapi juga untuk memperkuat urgensi moral terhadap isu tersebut. Penggunaan simbol-simbol melalui

*symbolic politics* berdampak pada peningkatan kesadaran global, yang menciptakan tekanan moral dan politik pada pemerintah Venezuela. Hal ini turut berkontribusi pada penurunan angka *extrajudicial killings* karena pemerintah menghadapi tekanan publik, baik internal maupun eksternal, untuk memperbaiki situasi HAM.

Meskipun taktik ini efektif dalam membangun dukungan internasional, menumbuhkan empati publik, dan memperkuat tekanan internasional, dampaknya terhadap perubahan kebijakan atau akuntabilitas langsung dari pemerintah Venezuela masih terbatas. Pemerintah Venezuela tetap mempertahankan posisi yang keras, sering kali menyangkal tuduhan yang dilayangkan dan pemerintah memiliki kontrol terhadap media domestik yang memungkinkan mereka membatasi eksposur simbol-simbol tersebut di dalam negeri sehingga mengurangi dampaknya pada opini publik Venezuela sendiri.

Namun dalam jangka panjang, taktik *symbolic politics* ini membantu menciptakan lingkungan dimana pemerintah Venezuela semakin terisolasi di panggung internasional, menempatkan pelanggaran HAM di bawah pengawasan yang lebih ketat dan memfasilitasi desakan terhadap penyelidikan dan intervensi dari lembaga internasional. Sementara dampak langsung pada pertanggungjawaban pemerintah Venezuela masih terbatas, taktik ini tetap efektif dalam menggerakkan opini publik internasional dan mempertahankan tekanan global yang berkelanjutan.

### <sup>1</sup> **5.3 Leverage Politics**

*Leverage politics* merupakan strategi yang melibatkan pemanfaatan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar atau pengaruh signifikan untuk memperluas dampak suatu gerakan. Strategi ini bertujuan untuk membangun aliansi dengan aktor-aktor strategis seperti pemerintah, lembaga internasional, atau media



berpengaruh yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan atau opini public secara luas. Dengan dukungan dari aktor-aktor berpengaruh tersebut, gerakan advokasi dapat meningkatkan legitimasi, mempercepat penyebaran informasi, serta menciptakan tekanan politik yang lebih besar terhadap pihak-pihak yang dituju. Dalam praktiknya, *leverage politics* juga dapat dimanfaatkan untuk membuka akses ke forum-forum internasional, dimana isu yang diadvokasikan dapat diperkenalkan di tingkat global (Maesarah & Wahyu, 2024).

*Amnesty International* sering menggunakan taktik ini dengan memanfaatkan hubungan mereka dengan aktor internasional yang memiliki kekuatan lebih besar untuk menekan pemerintah Venezuela. Menggunakan taktik ini, *Amnesty International* berusaha secara aktif untuk melibatkan sejumlah organisasi internasional lainnya yang dinilai memiliki pengaruh dan kapasitas lebih besar dalam menekan pemerintah Venezuela. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat advokasi atas kasus *extrajudicial killings* yang terjadi, khususnya melalui sinergi dengan badan-badan internasional yang memiliki kewenangan lebih luas.

*Amnesty International* menerbitkan laporan pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah Venezuela dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. *Amnesty International* terus mendorong agar *International Criminal Court* (ICC) untuk menyelidiki kasus-kasus ini sebagai langkah menuju akuntabilitas di tingkat internasional. Di tahun berikutnya pun *Amnesty International* terus melanjutkan advokasinya dengan merilis laporan-laporan terperinci mengenai kasus *extrajudicial killings* dan melakukan kerja sama dengan organisasi HAM lainnya, sehingga semakin banyak tekanan pada ICC untuk mempercepat penyelidikan awal mengenai Venezuela.

*International Criminal Court (ICC)* mengumumkan di tahun 2020 bahwa situasi di Venezuela telah masuk ke tahap penilaian awal untuk menentukan apakah terdapat dasar hukum untuk melakukan penyelidikan penuh. *Amnesty International* terus memberikan bukti dan analisis untuk membantu ICC dalam tahap ini, termasuk laporan forensik dan testimoni yang mendukung klaim kejahatan terhadap kemanusiaan. Hingga pada November 2021, ICC akhirnya mengumumkan pembukaan penyelidikan resmi atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Venezuela, hal ini merupakan hasil dari bukti yang dikumpulkan oleh *Amnesty International* bersama organisasi HAM lain yang konsisten menyoroti situasi Venezuela (Human Rights Watch, 2021).

Tidak hanya melibatkan ICC, *Amnesty International* mengajukan permintaan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk sebuah komisi penyelidikan independen yang bertugas menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus *extrajudicial killings*, di Venezuela. Berdasarkan bukti-bukti dan dorongan kuat dari berbagai organisasi HAM internasional lainnya, Dewan HAM PBB akhirnya membentuk Misi Pencari Fakta untuk Venezuela pada September 2019. Komisi ini diberi mandat untuk menyusun laporan resmi yang berisi temuan-temuan faktual mengenai pelanggaran HAM serius termasuk di dalamnya kasus *extrajudicial killings*, yang nantinya dapat dijadikan dasar bagi masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menanggapi krisis yang sedang berlangsung (amnestyusa.org, 2019).

Selama 2020 dan 2021, Misi Pencari Fakta melakukan investigasi menyeluruh dengan mengumpulkan bukti dan melakukan wawancara dengan korban, keluarga

korban, serta saksi. *Amnesty International* mendukung misi ini dengan memberikan data dan analisis tambahan yang mereka miliki yang kemudian Misi Pencari Fakta PBB meliris laporan untuk mengonfirmasi dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintah Venezuela, menambah kredibilitas dan tekanan internasional terhadap negara tersebut (ohchr.org, Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, n.d). Dengan adanya laporan ini, diharapkan Dewan HAM PBB dapat memberikan rekomendasi yang lebih kuat dan efektif untuk menuntut pertanggungjawaban para pelaku serta memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia di Venezuela melalui intervensi internasional yang sesuai.

Strategi ini didasarkan pada upaya melibatkan aktor-aktor dengan kekuatan yang lebih besar, baik secara politik maupun institusional, dalam rangka mendorong akuntabilitas pemerintah yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. *Amnesty International* mengakui bahwa tekanan domestik mungkin tidak cukup untuk mempengaruhi perubahan kebijakan di negara yang memiliki pemerintahan otoriter seperti Venezuela. Oleh karena itu, taktik ini menjadi penting dalam upayanya dengan memanfaatkan hubungan bersama organisasi internasional seperti *International Criminal Court (ICC)* dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Melalui laporan-laporan investigasi berbasis bukti, *Amnesty International* menarik perhatian lembaga-lembaga ini untuk terlibat lebih jauh dalam pelanggaran pelanggaran yang terjadi di Venezuela. Misalnya, Misi Pencari Fakta PBB telah menerbitkan sejumlah laporan rinci yang mengungkapkan pola pelanggaran HAM sistematis di Venezuela, tidak terkecuali tindak eksekusi di luar hukum. Laporan-laporan ini menyediakan bukti yang dapat digunakan komunitas internasional untuk

menuntut akuntabilitas pemerintah Venezuela atas pelanggaran tersebut (Amnesty International, 2021). Selain itu, penyelidikan formal yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan kemanusiaan di Venezuela merupakan langkah maju dalam menekan pemerintah untuk bertanggungjawab dengan potensi untuk membawa pejabat yang terlibat ke proses hukum jika bukti yang cukup ditemukan (Dib & Woo, 2023).

Upaya *Amnesty International* untuk mendorong ICC membuka penyelidikan awal terkait pelanggaran ini merupakan contoh *leverage politics* yang menunjukkan penggunaan kekuatan legal dan politik ICC untuk memperbesar dampak advokasi di tingkat nasional. Selain itu, *Amnesty International* mendorong Dewan HAM PBB untuk membentuk komisi penyelidikan independen guna menyelidiki kasus-kasus *extrajudicial killings* di Venezuela, dengan memanfaatkan legitimasi Dewan HAM sebagai instrumen tambahan untuk menekan pemerintah Venezuela.

Terjadinya penurunan angka *extrajudicial killings* di Venezuela pada periode 2017-2021 menunjukkan bahwa taktik *leverage politics* yang diupayakan cukup mampu menekan pemerintah Venezuela dengan memanfaatkan aktor eksternal untuk memperbesar dampak tekanan terhadap pemerintah. Dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh ICC, *leverage politics* yang dilakukan oleh *Amnesty International* menciptakan tekanan hukum yang 'menakutkan' bagi para pejabat dan aparat keamanan. Selain itu, investigasi yang dilakukan oleh Misi Pencari Fakta PBB memberikan legitimasi lebih terhadap pelanggaran HAM yang terjadi sekaligus memicu reaksi dalam negeri untuk mengurangi kekerasan agar menghindari sanksi yang lebih berat. Secara keseluruhan meskipun strategi yang digunakan menunjukkan beberapa keberhasilan dalam mobilisasi dukungan internasional dan

peningkatan kesadaran, tatangan besar tetap ada dalam hal efektivitas jangka panjang dan respons pemerintah yang resistif.

#### **5.4 Accountability Politics**

*Accountability politics* adalah strategi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktor-aktor target, seperti pemerintah atau institusi, mematuhi komitmen mereka terhadap perubahan kebijakan atau perilaku. Strategi ini berfokus pada upaya mengikat aktor-aktor tersebut melalui komitmen formal, yang biasanya berbentuk dokumen legal tertulis. Dokumen ini menjadi bukti nyata dari kesepakatan yang dihasilkan dan berfungsi sebagai alat pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan atau perilaku benar-benar dilaksanakan. Komitmen tertulis memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai dasar untuk memantau, mengevaluasi, dan menuntut akuntabilitas dari aktor target. Strategi ini tidak hanya mempengaruhi keputusan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko pengingkaran komitmen oleh aktor yang bersangkutan (Virgy, Djuyandi, & Darmawan, 2020).

Dalam kasus *extrajudicial killings* di Venezuela, *Amnesty International* secara konsisten menerapkan taktik *accountability politics* guna menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah Venezuela atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan negara. Pendekatan *accountability politics* ini melibatkan upaya untuk mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan merujuk pada standar dan komitmen <sup>2</sup> hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional. Selain itu taktik ini juga berfokus pada mobilisasi tekanan dari aktor-aktor internasional untuk memastikan bahwa pemerintah yang bersangkutan bertanggungjawab atas tindakannya.

*Amnesty International* sering merujuk pada komitmen Venezuela terhadap perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Statuta Roma yang membentuk *International Criminal Court (ICC)*. *Amnesty International* memanfaatkan fakta bahwa pemerintah Venezuela telah meratifikasi perjanjian-perjanjian ini untuk mengungkap inkonsistensi antara komitmen formal pemerintah dengan praktik yang terjadi di lapangan, terutama terkait kasus-kasus pembunuhan di luar hukum ([amnesty.org](http://amnesty.org), Amnesty International, 2021). Dengan memaparkan pelanggaran-pelanggaran ini, *Amnesty International* mendesak komunitas internasional untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah Venezuela atas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perjanjian internasional tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari penyelidikan resmi yang dilakukan oleh *International Criminal Court (ICC)*, pada November 2021 ditandatangani sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)* antara ICC dengan pemerintah Venezuela sebagai bentuk kesepakatan untuk bekerja sama dalam penyelidikan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Venezuela. Dalam MoU ini pemerintah Venezuela menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan ICC dalam proses penyelidikan awal dan berjanji untuk menyediakan akses dan bantuan yang diperlukan bagi ICC. Selain itu dalam MoU ini juga menegaskan penghormatan Venezuela terhadap prinsip-prinsip Statuta Roma yang menunjukkan bahwa Venezuela bersedia mengakui yurisdiksi ICC (International Criminal Court, 2021).

**Tabel 5. 1 Perjanjian HAM Internasional**

<b>Perjanjian</b>	<b>Diratifikasi</b>	<b>Tujuan Perjanjian</b>	<b>Relevansi</b>
Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)	10 Mei 1978	ICCPR bertujuan untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul secara damai, 46a katas keadilan, serta perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan buruk.	Komitmen Venezuela terhadap ICCR melarang tindakan eksekusi di luar hukum, penyiksaan, serta penghukuman tanpa proses peradilan, yang justru banyak dilanggar dalam kasus-kasus eksekusi di luar hukum oleh aparat keamanan Venezuela.
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT)	29 Juli 1991	Mencegah, melarang, dan memberantas tindakan penyiksaan serta perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat di seluruh dunia.	Penyiksaan sering kali mendahului eksekusi di luar hukum dalam kasus-kasus <i>extrajudicial killings</i> di Venezuela. Konvensi ini mewajibkan Venezuela untuk mencegah tindakan penyiksaan kejam yang

			dilakukan oleh aparat keamanan negara.
Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional ( <i>International Criminal Court</i> – ICC)	7 Juni 2000	Mendirikan Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengadili kejahatan paling serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.	Dalam konteks pelanggaran HAM berat di Venezuela, termasuk <i>extrajudicial killings</i> , <i>Amnesty International</i> dan lembaga lainnya telah mendorong ICC untuk menyelidiki pemerintah Venezuela atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk esekusi di luar hukum.
Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED)	19 April 2011	Tujuan utama dari ICPPED adalah untuk melindungi individu dari penghilangan paksa dan memastikan akuntabilitas atas pelanggaran tersebut.	Dalam beberapa kasus <i>extrajudicial killings</i> , korban mengalami penghilangan paksa sebelum dieksekusi. Penghilangan ini melanggar kewajiban Venezuela untuk



			melindungi individu dari tindakan sejenis.
<i>Memorandum of Understanding between the Bolivarian Republic of Venezuela and the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court</i>	November 2021	MoU ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah Venezuela berkomitmen menyediakan akses dan informasi yang diperlukan bagi ICC untuk penyelidikan, memastikan akuntabilitas melalui sistem peradilan domestik, dan mencegah impunitas.	Dengan MoU ini, ICC memperoleh landasan untuk terus menekan Venezuela agar mengurangi praktik-praktik kekerasan yang sistematis, termasuk eksekusi di luar hukum. Selain itu MoU memungkinkan ICC untuk memantau efektivitas proses hukum di Venezuela.

. Strategi ini berfokus pada memastikan bahwa pemerintah Venezuela mematuhi komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian internasional terkait HAM. *Amnesty International* menggunakan komitmen formal Venezuela terhadap berbagai perjanjian internasional untuk mengekspos inkonsistensi antara kebijakan yang dijanjikan secara internasional dengan tindakan represif yang terjadi di lapangan termasuk tindakan eksekusi <sup>4</sup> di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan seperti FAES.

Namun, strategi ini menghadapi beberapa kelemahan. Rezim otoriter yang dipimpin oleh Nicolas Maduro sering kali mengabaikan tekanan internasional, bahkan menggunakan propaganda untuk mendiskreditkan strategi ini, sehingga mengurangi efektivitas di tingkat domestik. Sementara mobilisasi komunitas internasional dan badan-badan seperti ICC dapat menjadi alat yang efektif untuk menuntut akuntabilitas, keberhasilan taktik ini sangat bergantung pada respons institusi internasional dan konsistensi tekanan yang diberikan. Tetapi tentu saja hal tersebut menghasilkan ketergantungan pada mekanisme internasional, yang mana sering kali berjalan lambat dan menghadapi hambatan prosedural. Kurangnya penerapan di tingkat lokal karena *Amnesty International* belum sepenuhnya mampu menjangkau sistem peradilan domestik Venezuela yang diwarnai kontrol pemerintah, serta terbatasnya mekanisme pemantauan pasca-laporan sehingga sulit untuk mengukur dampak nyata strategi ini terhadap reformasi kebijakan di Venezuela (Rahmania, 2024).

Untuk meningkatkan efektivitas, *Amnesty International* perlu lebih fokus pada penguatan kolaborasi dengan organisasi lokal guna memperkuat akuntabilitas domestik dan membangun tekanan internal. Selain itu, *Amnesty International* dapat mengadvokasi reformasi langsung melalui mekanisme diplomatik dengan menargetkan negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Venezuela. Dengan pendekatan yang lebih holistik, strategi *accountability politics* ini dapat memberikan dampak yang lebih besar tidak hanya di tingkat internasional tetapi juga di dalam negeri.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

*Amnesty International* telah memainkan peran krusial dalam advokasi hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kasus-kasus pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*) di Venezuela selama periode 2017 – 2021. Organisasi ini menggunakan pendekatan *Transnational Advocacy Network* (TAN) untuk memadukan beragam strategi advokasi yang bertujuan menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bawah rezim Nicolas Maduro. Pendekatan ini menekankan pentingnya jaringan lintas negara dalam membangun solidaritas global dan memengaruhi aktor-aktor politik internasional.

Upaya *Amnesty International* dalam advokasi ini mengacu pada empat konsep utama yang menjadi pilar dalam teori TAN yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Pertama, *Amnesty International* memanfaatkan *information politics* dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi yang kredibel mengenai kasus-kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Venezuela. Laporan investigasi yang diterbitkan, seperti laporan “*Hunger for Justice*”, menjadi salah satu alat penting dalam menyebarkan data yang mendetail dan terverifikasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Kedua, dalam konteks *symbolic politics*, *Amnesty International* dengan cermat memilih dan menonjolkan kasus-kasus yang memiliki nilai simbolis tinggi termasuk citra visual dan narasi yang kuat untuk menarik perhatian masyarakat internasional dan membangkitkan empati global terhadap situasi di Venezuela.

Selain itu, *Amnesty International* memanfaatkan *leverage politics* dengan membangun aliansi strategis bersama aktor-aktor internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *International Criminal Court* (ICC). Melalui hubungan ini, *Amnesty International* mampu menekan pemerintah Venezuela dengan mendorong adanya sanksi internasional dan penyelidikan atas pelanggaran yang terjadi. Terakhir, melalui *accountability politics*, *Amnesty International* berupaya untuk memastikan adanya pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara Venezuela. Mereka mengadvokasi perlunya investigasi independen serta pengadilan di tingkat internasional untuk memastikan pelaku kejahatan hak asasi manusia diadili.

Upaya *Amnesty International* tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya akses ke Venezuela, yang membatasi kemampuan mereka dalam memperoleh data langsung di lapangan. Di samping itu, pemerintah Venezuela secara aktif menolak temuan-temuan *Amnesty International* yang membuat proses advokasi menjadi lebih kompleks. Respons internasional yang terbatas juga menjadi hambatan dimana negara-negara kunci yang memiliki pengaruh tidak selalu merespons dengan tindakan yang signifikan.

Meskipun menghadapi tantangan, dampak dari pendekatan ini terlihat dalam beberapa aspek penting. Pertama, terdapat penurunan angka *extrajudicial killings* selama periode 2017 – 2021 sebagai akibat dari meningkatnya pengawasan internasional. Kedua, advokasi ini menciptakan tekanan diplomatik yang muncul dari berbagai aktor internasional yang dipengaruhi oleh kampanye *Amnesty International*. Ketiga, advokasi ini berkontribusi pada peningkatan legitimasi upaya perlindungan HAM dimana laporan investigatif dan dokumentasi *Amnesty*

*International* sering dijadikan rujukan oleh lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

## 6.2 Saran

*Amnesty International* perlu terus meningkatkan koordinasi <sup>2</sup> dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia (HAM) lokal di Venezuela untuk memastikan bahwa data dan informasi yang mereka kumpulkan lebih komprehensif dan akurat, terutama meningat keterbatasan akses langsung di lapangan. Kerja sama ini dapat memperkuat kapasitas investigasi serta memberikan perspektif lokal yang lebih mendalam terhadap situasi HAM di negara tersebut. Selain itu *Amnesty International* juga dapat memperluas jangkauan advokasinya dengan memperkuat kampanye di media sosial, menggunakan kisah-kisah simbolis dan visual yang kuat untuk menarik perhatian global secara cepat dan efektif. Platform media sosial memiliki potensi untuk menyebarkan pesan-pesan advokasi secara luas dan mendalam, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran publik tentang apa yang sedang terjadi di Venezuela.

*Amnesty International* juga perlu terus memobilisasi dukungan internasional yang lebih kuat dengan mendorong aktor-aktor global untuk meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap pemerintah Venezuela. Dukungan dari komunitas internasional ini sangat penting dalam mendorong akuntabilitas dan mengakhiri impunitas bagi pelanggaran HAM yang terjadi di bawah rezim Nicolas Maduro. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, berbasis informasi, dan didukung oleh kekuatan diplomatik global, *Amnesty International* dapat memperkuat upayanya dalam memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Venezuela.

# Strategi Amnesty Internatioal dalam Advokasi Hak Asasi Manusia pada Kasus Extrajudicial Killings di Venezuela Tahun 2017 - 2021

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.ub.ac.id](https://repository.ub.ac.id)

Internet Source

1%

2

[repositori.uin-alauddin.ac.id](https://repositori.uin-alauddin.ac.id)

Internet Source

1%

3

[ejournal.uncen.ac.id](https://ejournal.uncen.ac.id)

Internet Source

1%

4

[yeromidiary.wordpress.com](https://yeromidiary.wordpress.com)

Internet Source

1%

5

[www.solider.id](https://www.solider.id)

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN  
SIMILARITY**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabilla Putri Heryana Amin  
NIM : 07041182025002  
Prodi : Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan *similarity* Skripsi yang berjudul "STRATEGI *AMNESTY INTERNATIONAL* DALAM ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA PADA KASUS *EXTRAJUDICIAL KILLINGS* DI VENEZUELA TAHUN 2017 – 2021" adalah 4%

Dicek oleh operator:

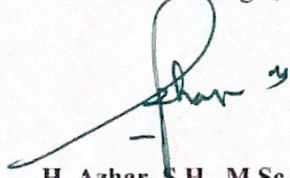
1. Dosen Pembimbing
2. UPT Perpustakaan

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Palembang, 22 November 2024

Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1,



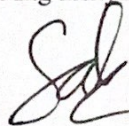
H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D  
NIP. 196504271989031003

Dosen Pembimbing 2,



Yuni Permatasari, S.IP., M.HI  
NIP. 199706032023212021

Yang menyatakan,



Salsabilla Putri Heryana Amin  
NIM 07041182025002